



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN
KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 14-15 DESEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dalam rangka menjalankan fungsi dan peran legislatif, anggota Komisi II DPR RI berupaya untuk terus menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut, anggota DPR RI akan melakukan kunjungan Kerja Reses di Masa Sidang II Tahun 2020-2021 ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta penjelasan terkait beberapa persoalan yang menjadi pembidangan kerja Komisi II DPR RI.

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat penting bagi anggota DPR RI Komisi II, mengingat ada persoalan strategis yang harus jadi perhatian utama, yaitu terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 yang pelaksanaannya dilakukan dimasa bencana non-alam pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tanpa mengesampingkan persoalan lain seperti masalah reformasi birokrasi dan reforma agraria, Komisi II DPR RI akan banyak meminta penjelasan terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, Komisi II DPR RI akan melakukan pertemuan sekaligus dialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan beserta jajarannya, serta penyelenggara pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu Kalimantan Timur.

Disamping untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan program KTP-el, melalui pertemuan tersebut Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sekaligus mendapatkan informasi secara langsung terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kab. Paser, Kab. Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan.

Komisi II DPR RI juga akan mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, dimana pada pertemuan tersebut Komisi II DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terkait beberapa agenda yang telah dan akan dilaksanakan oleh BPN di Kalimantan Timur, antara lain pelaksanaan program PTSL, redistribusi tanah, survey,

pengukuran, dan pemetaan, masalah ketataruangan, serta penanganan kasus pertanahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Pandeglang, Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur ini berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Arif Wibowo (A-210) Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI P** dan anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGT	N A M A	KETERANGAN
1.	A-28	H. Yaqut Cholil Quomas	Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F- PKB
2.	A-141	Drs. Djarot Saiful Hidayai	Anggota/F- PDIP
3.	A-195	Dr. H. Heru Sudjatmoko, M.Si	Anggota/F- PDIP
4.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/F- PDIP
5.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/F-PG
6.	A-283	Ir. Hanan A. Rozak, M.S	Anggota/F-PG
7.	A-105	Andika Pandu Puragbaya, S.Psi, M.Si., M.Sc	Anggota/F-Gerindra
8.	A-133	Elnino M. Husein Mohi, ST., MSi	Anggota/F- Gerindra
9.	A-384	M. Syamsul Luthfi, S.E	Anggota/F- Nasdem
10.	A-53	Edward Tannur, S.H.	Anggota/F- PKB
11.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/F-PKS

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan TV Parlemen.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2020 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.

C. HASIL KUNJUNGAN

1. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi :

Memasukan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja yang mengukur Keberhasilan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didalam Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 melalui revisi RPJMD Tahun 2019-2023 yaitu :

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
Misi 5: Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.	
Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformas Birokrasi
Sasaran 16: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Indeks Kualitas Keabiaakn - Indeks Perencanaan - Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda
Sasaran 17 Terwujudnya Birokrasi Kapable	- Indeks Kelembagaan - Indeks Pemerintahan Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Profesionalitas ASN - Indeks Merit System - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sasaran 18 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

- Pembentukan Role Model dan Agent Of Change (Agen Perubahan) Reformasi Birokrasi di Setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Role Model dibentuk bahwa Pimpinan Organisasi yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya.
- Agent Of Change adalah Individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya.
- Melakukan pertemuan secara berkala baik Rapat kerja, Workshop, Asistensi Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Reformasi Birokrasi disetiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Tim Reformasi Birokrasi Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada setiap area perubahan secara berkala.
- Hambatan dalam penerapan Reformasi Birokrasi Jawaban :
- Didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih ada beberapa Indikator Hasil Antara Area Perubahan yang penentuan / Peraturan yang mengatur Indikator tersebut belum ada/tersedia sehingga masih kesusahan didalam mengukur Indeksnya.
- Pola pikir/ Mindset sebagian besar Perangkat Daerah beranggapan bahwa reformasi birokrasi itu hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Biro Organisasi Sendiri. Belum dianggap menjadi tanggungjawab atau kepentingan bersama
- Penerapan e-government di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain adalah sebagai berikut:
 1. LAPORI-SP4N yang berfungsi sebagai layanan penyampaian semua apirasi dan pengaduan masyarakat.
 2. LPSE yang berfungsi sebagai layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara el ektronik.
 3. OPO (Otomatisasi Perizinan Online) yang berfungsi sebagai layanan publik terintegrasi agar proses perizinan dapat lebih mudah dan transparan.
 4. Samsat Centralized Information System yang berfungsi sebagai Sistem Informasi SAMSAT yang tersentralisasi untuk memudahkan pengelolaan, pengolahan, monitoring dan pemeliharaan data Samsat, e-Samsat untuk mendekatkan layanan dan pilihan kepada Wajib Pajak, dengan Prinsip Kapan saja dan Dimana saja serta acuan mudah dan cepat yaitu proses dapat dilakukan selama 24 jam Online Tanpa antrian bisa melalui ATM terdekat.

Sistem e-government yang diterapkan tersebut dapat memangkas proses birokrasi terhadap pelayanan kepada masyarakat dengan cara langsung mengunjungi situs masing-masing layanan secara lengkap dan menyeluruh sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien.

Bentuk inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan berbagai sosialisasi dan mengembangkan serta meningkatkan sistem informasi layanan tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Rekrutmen CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemprov Kaltim

- Cukup baik dan lancar
- Pada prinsipnya adalah pelaksanaan rekrutmen CPNS dan PPPK adalah murni mekanismen yang diatur oleh KemenpanRB dan teknisnya diatur oleh BKN, yang dilakukan Pemprov Kaltim atau seluruh instansi K/L/P hanya mengikuti dan menjadi fasilitator pelaksanaan ujian dan verifikasi administrasi
- Instansi Melakukan penyusunan kebutuhan dan mengusulkan kebutuhan tersebut ke KemenpanRB selanjutnya pelaksanaan rekrutmen sesuai dengan SOP yang telah ditentukan KemenpanRB dan BKN

Yang perlu mendapat perhatian khusus terkait rekrutmen CPNS dan PPPK:

- Perlu adanya standar yang dibuat Pemerintah Pusat terkait :
 1. Penyamaan gelar seluruh lulusan Perguruan Tinggi
 2. Rumpun Pendidikan yang jelas
 3. Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang lengkap

NIP yang telah ditetapkan:

- Semula formasi yang diberikan 368 formasi terbagi menjadi
 - A. Tenaga Pendidik : 252
 - B. Tenaga Kesehatan : 71
 - C. Tenaga Teknis : 45
 - Hasil seleksi formasi yang terpenuhi hanya 353 formasi :
 - A. Tenaga Pendidik : 246
 - B. Tenaga Kesehatan : 63
 - C. Tenaga Teknis : 44
- 15 Formasi kosong disebabkan tidak ada pelamar pada formasi tersebut dan tidak ada pelamar yang lulus (rata-rata adalah formasi Dokter spesialis dan Guru SMK yang bersifat spesifik ex. Guru Nautika Kapal/Pelayaran)
- Usulan NIP yang telah dikirim ke BKN pada tanggal 30 November 2020 sejumlah 353 usulan NIP CPNS
- Per tanggal 9 Desember 2020 proses verifikasi usulan NIP sedang berjalan

Kendala Pemerintah dalam mengimplementasikan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran ;

- Kendala utama dalam mengimplementasikan Inpres No. 4 Tahun 2020 adalah bahwa proses tersebut harus dilaksanakan segera dan dihantui kekhawatiran akan dilakukan penundaan atau pengurangan dana transfer Pemerintah Pusat ke Daerah sehingga Pemerintah Daerah melaksanakan Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran dilakukan dengan segera dan kurang melakukan konsolidasi yang solid dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur. Kendala lainnya bahwa ketersediaan kebutuhan Alat-alat Kesehatan (Ventilator, dan Bahan Habis pakai kesehatan (Masker, baju APD) sangat sukar diperoleh dan walaupun diperoleh dengan harga yang mahal dan relatif terbatas jumlahnya. Harga alat-alat kesehatan dan bahan habis pakai sangat fluktuatif, sehingga besaran harga yang diperkirakan ternyata berbeda dengan saat pelaksanaan.
- Jumlah dana yang disiapkan untuk penanganan Pandemi Covid 19 ini sebesar Rp. 500 milyar yang terdiri dari : Bidang Kesehatan sebesar Rp. 250 Milyar, Bidang Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 95 milyar dan Bidang jaring Pengaman sosial sebesar Rp. 155 Milyar.

- Terhadap kegiatan Non Fisik yang dilakukan re alokasi anggaran secara umum tidak terlalu berdampak, Namun lain halnya untuk kegiatan yang bersifat fisik ataupun pengadaan alat atau barang, maka realokasi anggaran dapat mempengaruhi capaian target yang direncanakan. Secara keseluruhan refocusing dan realokasi anggaran tidak mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi tetap berusaha menjaga agar perekonomian masyarakat terus berjalan dalam kondisi pandemi Covid 19 ini.

Dukungan Pemprov Kaltim kepada Pemkab/Pemkot di 9 Kab/Kota memberikan Hibah Dana untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebagai berikut :

REKAPITULASI NPHD PILKADA SERENTAK 2020 DI KALTIM					
NO	KABUPATEN/ KOTA	K P U	BAWASLU	PENGAMANAN	TOTAL
1	SAMARINDA	69,617,128,000	12,632,390,000	7,750,000,000	89,999,518,000
2	BALIKPAPAN	53,985,396,500	11,543,719,000	9,823,300,000	75,352,415,500
3	BONTANG	20,000,000,000	4,276,748,000	6,000,000,000	30,276,748,000
4	KUTAI TIMUR	49,055,856,625	16,858,117,000	6,100,000,000	72,013,973,625
5	KUTAI BARAT	37,930,998,725	13,902,124,000	7,400,000,000	59,233,122,725
6	KUTAI KARTANEGARA	84,874,231,350	19,380,024,000	9,816,785,500	114,071,040,850
7	BERAU	39,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	59,000,000,000
8	PASER	32,086,760,000	10,250,000,000	7,174,808,500	49,511,568,500
9	MAHAKAM ULU	34,053,446,000	8,500,000,000	3,000,000,000	45,553,446,000
	TOTAL	420,603,817,200	107,343,122,000	67,064,894,000	595,011,833,200

- Peran Aktif Kesbangpol dalam setiap tahapan melalui pemantauan perkembangan politik di daerah sesuai amanat Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah serta berkoordinasi dengan penyelenggara dan aparat keamanan, juga para Toga, Tomas.
- Melakukan sosialisasi, Dialog interaktif baik melalui Media Sosial dan Media elektronik, serta mendorong seluruh elemen masyarakat di Kaltim terkhusus para tokoh masyarakat untuk membangun narasi positif tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang sehat di masa pandemic covid-19.

Meskipun Pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi Covid -19 pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 namun kesadaran masyarakat Kalimantan Timur semakin meningkat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam menggunakan hak pilihnya, hal ini terbukti dengan capaian Tingkat Partisipasi Pemilih meningkat dibanding pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015.

Lebih jelas dapat dilihat pada matrik berikut :

No.	Kabupaten/Kota	2015		2020	
		DPT	Partisipasi	DPT	Partisipasi
1	Samarinda	582,262	49.17	576,981	52.20
2	Balikpapan	459,785	59.31	443,243	59.95
3	Bontang	125,459	64.38	121,694	71.84
4	Kukar	519,951	58.44	488,055	
5	Kubar	124,215	67.65	113,794	71.45
6	Kutim	269,567	48.42	232,641	
7	Berau	152,007	63.33	159,254	69.74
8	Paser	179,619	66.86	187,877	66.90
9	Mahulu	21,216	76.55	26,544	78.53
		2,434,081	61.57	2,350,083	52.29

Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan lancar dengan tingkat kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan covid-19 baik pemakaian masker dan jaga jarak dengan kesadaran yang tinggi pada saat pemungutan suara.

Kondusifitas keamanan dan ketertiban

Sampai dengan saat ini 10 Desember 2020, situasi dan kondisi di seluruh kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur dalam keadaan kondusif, tidak ada kerawanan atau gesekan antar pendukung paslon terkait dengan hasil yang sudah diketahui melalui quickcount dari berbagai Lembaga.

Netralitas ASN

- Secara umum netralitas ASN tetap dipatuhi oleh ASN di Kaltim, meskipun ada 1 kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang berujung kepada Rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin sedang, atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.
- Dimana ybs terbukti menyampaikan pidato di depan publik atau secara terbuka yang mengandung unsur keberpihakan atau dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.
- Sanksi yang tertuang dalam surat KASN No R-3221/KASN/11/2020 ditandatangani Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto, tertanggal 3 November 2020, merujuk pada Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Perkembangan Program Ktp-El pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

Program KTP-Elektronik di Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan sangat baik. Tingkat perekaman di Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 99,71% diatas rata rata nasional sebesar 98 %.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur per tanggal 6 Juni 2020 sudah tidak lagi menerbitkan surat keterangan (suket/KTP sementara) karena blagko KTP-el sudah disediakan Pemerintah Pusat dengan jumlah yang cukup sehingga begitu warga masyarakat akan melakukan perekaman atau pengurusan KTP-el karena rusak, hilang, pindah alamat, perubahan bio akan langsung diterbitkan KTP elektroniknya.

Berdasarkan laporan harian dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota se kalimantan timur s.d tanggal 6 desember 2020 perekaman ktp-el di kabupaten/kota se kalimantan timur sebanyak 2.5572.132 jiwa dari jumlah wajib ktp semester 1 tahun 2020 sebesar 2.582.232 jiwa atau mencapai 99,71% dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	JMH PDDK SMST I 2020	WAJIB KTP SEMESTER I 2020	PEREKAMAN	
				TGL S/D 6 DES 2020	%
1	2	3	4	15	16
1	KUTAI KARTANEGARA	705.168	491.467	499.131	101,56
2	BALIKPAPAN	672.878	486.248	486.797	100,11
3	KUTAI TIMUR	424.170	293.413	257.391	87,72
4	SAMARINDA	801.035	565.185	560.854	99,23
5	BERAU	235.756	167.053	167.597	100,33
6	PASER	267.276	190.388	191.081	100,36
7	BONTANG	182.484	125.379	127.499	101,69
8	KUTAI BARAT	165.453	116.239	118.032	101,54
9	MAHAKAM ULU	31.070	23.657	24.533	103,70
10	PENAJAM PASER UTARA	175.871	123.205	124.217	100,82
JUMLAH		3.661.161	2.582.232	2.557.132	99,71

Terkait dengan upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan cakupan perekaman KTP-el di Kabupaten/Kota yaitu:

1. Memberikan bantuan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el untuk Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
2. Memberikan bantuan mobil pelayanan keliling untuk menjangkau pelayanan masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga semua masyarakat dapat terlayani dokumen kependudukannya dengan baik tanpa diskriminasi
3. Melakukan layanan terpadu bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak pada tanggal 9 desember 2020 upaya yang dilakukan pemerintah provinsi kalimantan timur sebagai berikut:

- Memberikan arahan untuk sinkronisasi data pemilih dengan KPU Kabupaten/Kota
- Memberikan arahan untuk melakukan jemput bola perekaman KTP-el di Kabupaten/Kota
- Memberikan arahan untuk melakukan perekaman bagi warga binaan pada lapas/Rutan di Kabupaten/Kota
- Memberikan arahan untuk melakukan layanan perekaman KTP-el di hari libur termasuk tetap membuka layanan pada hari H pemungutan suara
- Memberikan arahan untuk mengoptimalkan layanan online dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19
- Mengingat tingkat perekaman KTP-el di Kabupaten Kutai Timur masih belum mencapai target dilakukan kegiatan gotong royong penuntasan perekaman KTP-el di Kabupaten Kutai Timur dengan memberikan fasilitasi berupa : SDM Operator perekaman dan pencetakan, Peralatan rekam dan cetak, Ribbon KTP-el dan Blangko KTP-el

2. BAWASLU KALIMANTAN TIMUR

Provinsi Kalimantan Timur sendiri pada Tahun 2020 tidak melaksanakan Pilkada, dari 10 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah melaksanakan Pilkada pada Tahun 2018 bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembinaan terhadap 9 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada tahun 2020 tersebut. Diantara kegiatan pembinaan adalah, Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan setiap tahapan, melakukan simulasi pengisian Form A, LHP atau Laporan Hasil Pengawasan, Alat kerja Pengawasan baik online maupun offline, melakukan supervisi pengawasan, pendampinga kasus dan temuan hasil pengawasan, dan melakukan rapat koordinasi dan lainnya.

Pengawasan penetapan pasangan calon kepala daerah di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur;

- Calon tunggal :
 - Kutai Kartanegara : Edi Damansyah - Rendi Solihin
 - Balikpapan : H. Rahmad Mas'ud - Tohari Azis

- Calon Head to Head :
 - Berau
 - Hj.Seri Marawiyah - H. Agus Tamtomo
 - Hj. Sri Juniarsih Mas - H. Gamalis
 - Bontang
 - Basrie Rase – Najirah
 - Neni Moernianie – Joni
 - Kutai Barat
 - Martinus Herman Kenton – Abdul Azis
 - FX. Yapan – Edyanto Arkan
 - Mahakam Ulu
 - Juan Jenau – Indra Jaya
 - Bonifasius – Yohanes Afun

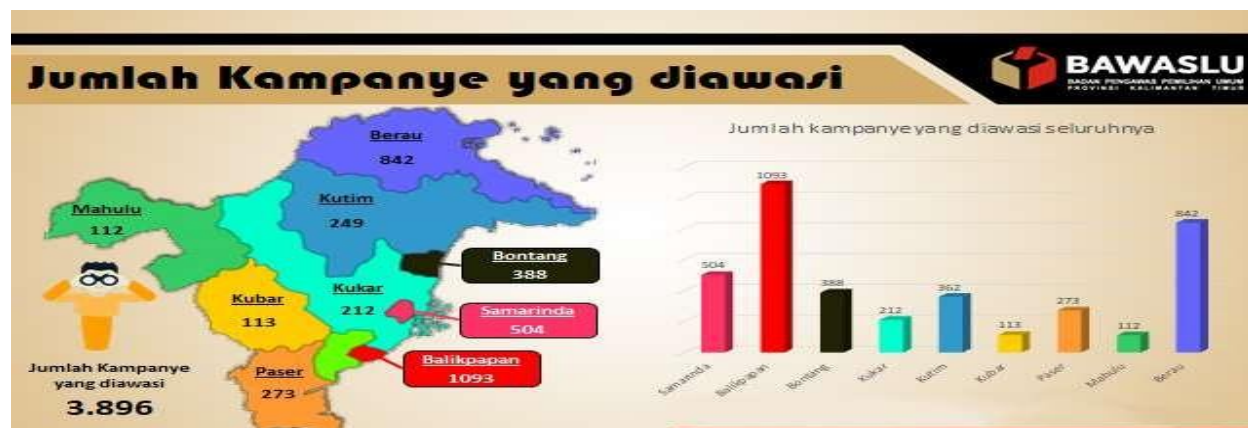
- Calon lebih dari 2 kandidat :
 - Kutai Timur
 - H. Mahyunadi – H. Lulu Kinsu
 - Awang Ferdian Hiidayat – Uce Prasetyo
 - Ardiansyah Sulaiman – H. Kasmidi Bulang
 - Paser
 - H. Toni Budi Hartono – H. Aji Sayyid Fathur Rahman
 - Alphad Syarif – M.Noor
 - Fahmi Fadli – Syarifah Masitah Ass
 - Ir. Sulaiman Eva Merukh – Ikhwan Wirawan
 - Samarinda
 - Barkati – Darlis
 - Andi Harun – Rusmadi Wongso
 - Zairin – Sarwono

Pengawasan penetapan pasangan calon kepala daerah di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan tahapan pengawasan pencalonan dengan dua metode, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan pencermatan data. Pengawasan melekat yang dimaksud adalah melakukan pengawasan secara melekat terhadap tahapan demi tahapan pencalonan yang diawasi secara langsung oleh jajaran pengawas. Pengawasan pencermatan data yang dimaksud adalah mengakumulasi data yang masuk dari hasil pengawasan langsung yang dihimpun secara online dan offline untuk diproses menjadi rekapitulasi pengawasan.

Pengawasan tahapan Kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur:

Hasil rekapitulasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 3.899 kampanye yang tersebar di 9 kabupaten/kota penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.



Kampanye yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut;

- 1.670 kali dilakukan kampanye pertemuan terbatas , 1.859 kali dilakukan kampanye pertemuan tatap muka, 10 kampanye melalui media daring/elektronik dan sebanyak 41 kampanye dilakukan dengan metode lainnya.
- Terdapat 66 dugaan pelanggaran yang ditemukan, 59 diantaranya dugaan pelanggaran protokol kesehatan covid-19.
- Pencegahan dan tindakan yang dilakukan oleh pengawas yaitu mengeluarkan 59 peringatan tertulis dan melakukan pembubaran kampanye yang dilakukan.

Selama tahapan pilkada serentak tahun 2020 digelar, terjadi tren kenaikan kekerasan/intimidasi terhadap pengawas pemilu.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menghimpun terjadinya kekerasan/intimidasi baik yang bersifat fisik, verbal maupun psikis yang dialami oleh jajaran pengawas. 14 kasus kekerasan dialami oleh panwaslu kecamatan, staff bawaslu kabupaten/kota, pengawas kelurahan atau desa. Bawaslu Kalimantan Timur mengkodifikasikan kekerasan yang dialami pengawas kepada 3 pihak, yaitu pasangan calon, tim pemenangan dan pihak terkait lainnya.



- Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan sudah dan sedang menjalankan Perbawaslu No 4 Tahun 2020 terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam (covid-19) dalam setiap kegiatan baik itu pengawasan, penanganan pelanggaran dan kegiatan lainnya.

- Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh jajaran terkait penyampaian laporan hasil pengawasan pada setiap tahapan melalui system online ada dua hal yang menjadi perhatian dan masukan Bawaslu Kalimantan Timur, yang pertama yaitu; aplikasi dari penyedia atau yang diturunkan ke daerah belum mumpuni, atau standar pelaporan menggunakan system online. Yang kedua; jaringan di daerah yang belum mencakup semua desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur. Dari 99 kecamatan dan 984 Desa/Kelurahan/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, masih terdapat 32 kecamatan dan 304 kelurahan/desa/kampung yang masih susah akses jaringan internet. Artinya daerah yang terkendala internet di Kalimantan Timur sebesar 30,9 % yang tersebar di 9 kabupaten/kota penyelenggara pilkada tahun 2020.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 telah melakukan koordinasi dengan stakeholder sentra gakkumdu, diantaranya :

Penanganan Pelanggaran online dilakukan salah satunya dengan melakukan klarifikasi via zoom sudah dilakukan kurang lebih kepada 8 saksi dan dilaporkan di Kutai Barat, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Bontang Dan Bawaslu Provinsi pemintaan keterangan ahli. Kendala masalah jaringan, dan klarifikator kesulitan untuk menunjukkan bukti berupa video kepada pihak yg diminta keterangan.

- Maret

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Kaltim pada tanggal 30 Maret 2020, membahas tentang penghentian sementara kegiatan sentra Gakkumdu Provinsi Kaltim

- Juli

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Kaltim pada tanggal 13 Juli 2020, membahas tentang pengaktifan Sentra Gakkumdu setelah adanya penundaan tahapan Pilkada 2020.

- September

Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Kaltim dari unsur Kepolisian ke Bawaslu Provinsi Kaltim pada tanggal 28-29 September 2020, membahas tentang kesiapan Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan pada masa kampanye

- 30 Oktober s/d 3 November 2020

Pengawasan dan atensi terkait penanganan penyidikan tindak pidana pemilihan tahun 2020 yang dilaksanakan penyidik Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur November

Rapat Koordinasi, membahas tentang evaluasi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan di Gakkumdu Kab/Kota

3. KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penetapan Daftar Pemilih Tetap se Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L + P
1	KUTAI KARTANEGARA	18	237	1,695	252,834	235,221	488,055
2	KUTAI TIMUR	18	141	769	124,533	108,108	232,641
3	KUTAI BARAT	16	194	390	59,686	54,108	113,794
4	SAMARINDA	10	59	1,962	293,573	283,408	576,981
5	BALIKPAPAN	6	34	1,505	221,589	221,654	443,243
6	MAHAKAM ULU	5	50	85	14,306	12,238	26,544
7	BONTANG	3	15	375	62,875	58,819	121,694
8	BERAU	13	110	558	84,961	74,293	159,254
9	PASER	10	144	644	97,245	90,632	187,877
TOTAL 9 KAB/KOTA DI KALTIM		99	984	7,983	1,211,602	1,138,481	2,350,083

Jumlah KPPS yang akan direkrut : 71.847 Petugas terdiri dari 55.881 Ketua dan Anggota KPPS dan 15.966 PAM TPS.

Pemutakhiran Data Pemilih

1. Dalam prosesnya PPDP berupaya maksimal dalam melakukan proses pencatatan dan penelitian pemilih dengan mendatangi warga pemilih dari rumah ke rumah di masa pandemi ini. Awal proses beberapa kendala ditemui dilapangan dengan ketidakmauan warga untuk ditemui petugas karena kekhawatiran atas penyebaran covid 19. Kendala ini diatasi dengan negosiasi kepada warga dibantu PPS dan PPK yang menerangkan bahwa proses Coklit tidak dilakukan di dalam rumah warga, namun cukup di pekarangan atau diluar rumah, dan petugas dilengkapi alat pelindung diri.
2. Beberapa kali didapatkan kendala pada Sidalih yang mengalami gangguan server atau jaringan yang sedikit memperlambat proses pemutakhiran data pemilih.
3. Selanjutnya penetapan DPT berjalan lancar, menyisakan dan merekomendasikan percepatan perekaman KTP el pada pemilih yang belum memiliki atau belum rekam KTP el. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan berkoordinasi Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan Kota setempat.

Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pendaftaran Pasangan Calon

1. Sebelum jadwal pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten dan Kota melaksanakan sosialisasi berkaitan syarat dan tata cara pendaftaran pasangan calon.
2. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatkan Bawaslu, Partai Politik, Bakal Calon Perseorangan, Kepolisian dan TNI berkaitan mekanisme pendaftaran pasangan calon dengan penerapan protokol kesehatan.
3. Penerapan protokol kesehatan pada saat pendaftaran calon dilaksanakan secara ketat, mulai dari jumlah orang yang telah dibatasi dalam proses penyerahan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, alat pelindung diri yang harus digunakan, hingga keharusan bakal calon melakukan tes swab sebelum mendaftar di KPU setempat.
4. Sehubungan bakal calon yang terkonfirmasi positif covid – 19, yang bersangkutan mengikuti proses pendaftaran melalui aplikasi zoom, hal ini terjadi di KPU Kabupaten Kutai Timur.
5. Secara garis besar, bahwa proses pendaftaran pasangan calon dilaksanakan secara tertib dengan protocol kesehatan, walaupun di beberapa tempat terjadi iring-iringan dalam rombongan besar yang mengantarkan bakal pasangan calon. Namun hal tersebut dapat diantisipasi oleh pihak Kepolisian dan TNI setempat, sehingga proses pendaftaran di KPU Kabupaten dan Kota tetap berjalan dengan tertib.

Penerapan Protokol Kesehatan pada masa Kampanye

1. Bahwa KPU Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Timur yang melaksanakan Pemilihan serentak telah melaksanakan sosialisasi terkait peraturan kampanye dan pelaksanaan kampanye di masa pandemic covid 19.
2. Rapat Koordinasi Kampanye dengan para pihak dan himbauan untuk kepatuhan kepada protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye juga telah disampaikan.
3. Bahwa mayoritas pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon dan fasilitasi kampanye (debat publik) oleh KPU Kabupaten dan Kota telah dijalankan dengan protokol kesehatan. Namun, di beberapa kegiatan terkonfirmasi telah terjadi pelanggaran dan mendapatkan peringatan tertulis dari Bawaslu setempat dan dibubarkan.

Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Protokol pencegahan penularan covid 19 di TPS dilaksanakan dengan tes rapid kepada seluruh KPPS. Pelaksanaan awal dilakukan tes rapid didapatkan sejumlah anggota KPPS yang reaktif. Sehingga dilaksanakan tahap selanjutnya dengan tes rapid kedua dan swab. Bagi anggota KPPS yang terkonfirmasi positif, maka dilakukan penggantian.
2. Pemeriksaan suhu tubuh KPPS, PTPS, Saksi dan Pemilih serta penggunaan bilik khusus bagi yang memiliki suhu 37,3 derajat celsius dijalankan dengan baik dan lancar.
3. Seluruh TPS telah melaksanakan penyemprotan disinfektan pada area TPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dan kembali dilakukan secara berkala dalam proses.
4. Sarana protokol kesehatan telah diterima seluruh TPS seperti sarung tangan petugas dan pemilih, sarana cuci tangan beserta sabun, handsanitizer, masker cadangan untuk pemilih.
5. Kepatuhan KPPS dalam penggunaan masker dan sarung tangan.

Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020

1. Bahwa seluruh jenis logistik pemungutan suara berupa surat suara, tinta, segel, formulir berhologram, formulir lainnya, sampul, buku panduan, templete, kotak suara, bilik, dan alat kelengkapan TPS serta APD telah sampai dan diterima oleh KPPS pada H-1 (8 Desember 2020). Mayoritas TPS menerima sesuai jumlah dan tepat waktu. Ditemui beberapa TPS yang kekurangan surat suara dan alat kelengkapan, namun hal tersebut dapat diatasi oleh masing-masing KPU setempat.
2. Bahwa dalam proses pengelolaannya, terjadi keterlambatan beberapa jenis barang, sehingga dilakukan proses penjemputan langsung kepada penyedia, karena waktu yang sudah sangat mendesak apabila tetap menunggu distribusi dari penyedia, seperti Form berhologram dan Buku Panduan.
3. Kendala yang didapati khususnya di wilayah Kalimantan Timur adalah tantangan geografis (jarak, waktu tempuh dan jalur transportasi yang) dan faktor alam dalam mendistribusikan logistik dari Gudang KPU setempat kepada PPK, PPS hingga TPS. Sehingga membutuhkan waktu yang memadai dalam menjawab tantangan tersebut. Sehingga beberapa keterlambatan diterimanya logistic, maka dilakukan percepatan penjemputan kepada penyedia sebagaimana poin 2 diatas. Dan beberapa APD disusulkan kepada PPK, PPS hingga TPS sebelum pemungutan suara dimulai.
4. Bahwa Pengelolaan logistik hingga pendistribusian dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
5. Secara umum, seluruh logistic dan APD untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat diterima dan digunakan di TPS pada hari pelaksanaan.

Upaya Pencegahan Penularan Covid - 19

1. Upaya pencegahan penularan covid 19 untuk penyelenggara, peserta dan pemilih dilaksanakan dengan beberapa rapat koordinasi yang melibatkan gugus tugas setempat serta pelaksanaan program sosialisasi selalu memasukkan materi protokol kesehatan.
2. Protokol pencegahan penularan covid 19 dalam tahapan lanjutan pemilihan serentak tahun 2020 khususnya pada masa pematangan daftar pemilih, rekrutmen dan pelantikan Badan Adhoc, Sosialisasi, Pendaftaran Pasangan Calon, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang saat ini masih dijalankan secara umum dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.

3. Adapaun pada masa kampanye, terjadi beberapa pelanggaran telah dapat ditertibkan oleh Bawaslu beserta jajaran.
4. Memastikan keberadaan dan kedisiplinan penyelenggara dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap tahapan yang dilaksanakan termasuk pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan :

1. *Sayembara mascot dan jingle Pilkada 2020*
2. *Launching mascot dan jingle*
3. *Kegiatan pembuatan video klip sosialisasi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara*
4. *Sosialisasi tahapan, program dan jadwal kepada stakeholders*
5. *Sosialisasi dalam bentuk Goes To School di 6 SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara*
6. *Sosialisasi dalam bentuk Zumba bersama KPU ke basis perempuan*
7. *Sosialisasi dengan pihak lain (komunitas/ormas)*
8. *Sosialisasi dalam bentuk spanduk, baleho dan umbul-umbul di 18 kecamatan, 237 desa/kelurahan*
9. *Sosialisasi melalui media massa cetak, elektronik dan media social seperti facebook, Instagram, website*
10. *Sosialisasi penyuluhan produk hukum kepada PPS*
11. *Sosialisasi partisipasi masyarakat ditingkat kecamatan*

Kegiatan yang Telah Dilakukan

KPU Kabupaten Paser telah melaksanakan :

1. Relawan Demokrasi.
2. Radio Lokal.
3. Tatap muka langsung dengan tetap mematuhi protkol kesehatan

KPU Kabupaten Berau telah melaksanakan :

1. Melaksanakan program KPU Goes to school
2. Sayembara lomba cipta mascot dan jingle Pilkada 2020
3. Sosialisasi kepada pemilih perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama
4. Sosialisasi dengan pihak terkait
5. Sosialisasi melalui laman resmi dan sosial media resmi KPU Kabupaten Berau
6. Sosialisasi dilakukan oleh PPK untuk pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan disabilitas
7. Sosialisasi telah dilakukan juga melalui akun FB PPK masing-masing PPK di 13 kecamatan.

KPU Kota Balikpapan telah melaksanakan :

1. *Melaksanakan program KPU Goes to School di 20 SMU/SMK di Kota Balikpapan*
2. *Menyelenggarakan Lomba Karya Tulis bertemakan Peningkatan Partisipasi dalam Pemilu bagi kalangan mahasiswa*
3. *Menyelenggarakan sayembara Desain Logo, Maskot dan Jingle Pilkada 2020*
4. *Membentuk Relawan Demokrasi dengan basis : keagamaan, pemuda/muda, disabilitas, warganet, perempuan*
5. *Melaksanakan sosialisasi keliling dengan 2 mobil sosialisasi yang berkeliling di 6 kecamatan di Kota Balikpapan*
6. *Pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi di setiap area public di wilayah kelurahan*
7. *Melaksanakan program KPU Goes to Campus*
8. *Melaksanakan konferensi pers di setiap tahapan krusial*
9. *Melaksanakan sosialisasi ke stakeholders sesuai tahapan dengan konsep Café Pemilu di halaman Kantor KPU Kota Balikpapan*
10. *Mengoptimalkan sosialisasi melalui website, Instagram dan Facebook KPU Kota Balikpapan*

KPU Kota Bontang telah melaksanakan :

1. Menyelenggarakan Lomba Desain Maskot dan Pembuatan Jingle Pilkada 2020
2. Bekerjasama dengan Mitra Kerja Sosialisasi KPU Kota Bontang dalam melakukan Sosialisasi, (Mitra Kerja Sosialisasi KPU Kota Bontang meliputi RS.Amalia, RSIB, RS.PKT, Unijaya, PT. Maharani Tuperware, GOW, PKK, Kantor Pos)
3. Melaksanakan sosialisasi keliling dengan mobil Si Boncos berkeliling Se Kota Bontang
4. Pemasangan Baliho, Spanduk, Baner, Poster sosialisasi di wilayah kelurahan, Kecamatan, Area Publik, di Lokasi Mitra Kerja Sosialisasi KPU
5. Kerjasama dengan media cetak, elektronik televisi, radio, media online dalam melakukan Sosialisasi
6. Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
7. Melaksanakan Sosialisasi ke stakeholders
8. Sosialisasi melalui website, Instagram dan Facebook KPU Kota Bontang

KPU Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan :

1. Menyelenggarakan sayembar Desain Logo, Maskot dan Jingle Pilkada 2020.
2. Melaksanakan sosialisasi keliling dengan 2 mobil sosialisasi yang berkeliling di 16 kecamatan di Kabupaten Kutai barat.
3. Pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi di setiap area public di wilayah Kampung/kelurah
4. Melaksanakan konferensi pers di setiap tahapan krusial.
5. Melaksanakan sosialisasi ke stakeholders sesuai tahapan dengan konsep Café Pemilu di halaman Kantor KPU Kota Balikpapan.
6. Melaksanakan sosialisasi dengan bekerja sama dengan Komunitas.
7. Mengoptimalkan sosialisasi melalui website, Instagram dan Facebook KPU Kota Balikpapan.

KPU Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan :

Koordinasi Para Pihak bentuk kegiatan Rapat Koordinasi

1. Sosialisasi dengan metode Tatap Muka bentuk kegiatan:
 - Sosialisasi Tatap Muka ke kampung-kampung (desa).
 - Sosialisasi Tatap Muka Pemilih Marginal.
2. Sosialisasi dengan Media Audio Visual bentuk kegiatan:
 - Pemasangan iklan dan advertorial melalui Media Cetak dengan topik antara lain: Tahapan Lanjutan, Prosedur Covid-19, Pemutakhiran Data Pemilih, dll.
 - Penyebaran materi cetak Baliho, Poster, Leaflet, dan Spanduk dengan topik antara lain: Tahapan Lanjutan, Prosedur Covid-19, Pemutakhiran Data Pemilih, dll.

Penyampaian iklan layanan masyarakat dalam bentuk audio dan talkshow melalui Media Elektronik Radio dengan topik antara lain: Tahapan Lanjutan, Prosedur Covid-19, Pemutakhiran Data Pemilih, dll.

KPU Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan :

- Penyampaian infografis atau konten iklan layanan masyarakat melalui Media Sosial dan Laman Resmi KPU Kabupaten Mahakam Ulu dengan topik antara lain: Tahapan Lanjutan, Prosedur Covid-19, Pemutakhiran Data Pemilih, dll.
- Penerbitan informasi teknis dalam bentuk berita singkat, press release, media gathering melalui Media Center (MC) KPU Kabupaten Mahakam Ulu dengan topik antara lain: Tahapan Lanjutan, Prosedur Covid-19, Pemutakhiran Data Pemilih, dll

Kendala Yang Dihadapi:

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara :

mengenai jadwal dan program sosialisasi yang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan covid-19, karena program sebelumnya sudah tersusun

KPU Kabupaten Paser :

Di saat pandemi ini sangat susah untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi selain dari daring dan medsos

KPU Kabupaten Berau :

1. Terbatasnya jumlah undangan pada kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Berau maupun kegiatan sosialisasi yang diturunkan kepada PPK di 13 Kecamatan.
2. Adanya kekhawatiran pemilih takut terpapar covid saat diundang mengikuti acara sosialisasi.
3. Adanya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap urusan demokrasi atau Pilkada disebabkan karena tidak terpenuhinya janji-janji politik yang pernah dijanjikan oleh pemerintah atau anggota DPR.
4. Banyaknya kegiatan sosialisasi yang tidak jadi dilakukan karena melibatkan orang banyak.

KPU Kota Samarinda :

1. Pembatasan peserta sosialisasi karena adanya aturan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
2. Kendala sosialisasi pada basis pemilih pemula dan pemilih muda menjadi tidak maksimal dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ini seluruh siswa dan mahasiswa belajar online/tidak datang ke sekolah dan kampus.
3. Banyaknya kegiatan yang dihapus karena adanya aturan yang melarang kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak massa dengan dasar protokol kesehatan COVID-19.
4. Meyakinkan masyarakat agar tidak takut untuk datang ke TPS karena adanya kekhawatiran pada masa pandemi ini.

KPU Kota Balikpapan :

Penyesuaian dengan protokol kesehatan membuat program yang telah tersusun sebelumnya harus disesuaikan kembali.

KPU Kota Bontang :

Dengan Kondisi Pandemi Covid 19 berkurangnya frekuensi sosialisasi/tatap muka, sehingga memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial, daring.

KPU Kabupaten Kutai Timur :

1. Pembatasan peserta sosialisasi karena adanya aturan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
2. Kendala sosialisasi pada basis pemilih pemula dan pemilih muda menjadi tidak maksimal dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ini seluruh siswa dan mahasiswa belajar online/tidak datang ke sekolah dan kampus.
3. Banyaknya kegiatan yang dihapus karena adanya aturan yang melarang kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak massa dengan dasar protokol kesehatan COVID-19.
4. Meyakinkan masyarakat agar tidak takut untuk datang ke TPS karena adanya kekhawatiran pada masa pandemi ini.

KPU Kabupaten Kutai Barat :

Penyesuaian dengan protokol kesehatan membuat program yang telah tersusun sebelumnya harus disesuaikan kembali.

KPU Kabupaten Mahakam Ulu :

Jaringan internet yang sering mengalami gangguan sehingga kurang memaksimalkan dalam penyampaian informasi Tahapan Pilbub melalui media audio visual dalam jaringan atau online dan media sosial.

Upaya/Kegiatan yang dilakukan Untuk Mencapai Target
Sejak tanggal 20 November 2020 – 8 Desember 2020

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. *Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum*
2. *Mengoptimalkan media sosial dan bahan – bahan sosialisasi*

KPU Kabupaten Paser :

1. Memaksimalkan kinerja relawan demokrasi
2. Memanfaatkan jaringan media sosial yang bekerjasama dengan media-media online yang dimiliki oleh Kabupaten
3. Melaksanakan tatap muka dengan jumlah terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan

KPU Kabupaten Berau

1. Sosialisasi dilakukan oleh komisioner langsung seperti beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada slide sebelumnya
2. Penurunan/pelimpahan agenda sosialisasi untuk 3 segmen kepada masing-masing PPK di 13 Kecamatan, yakni pemilih perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan disabilitas.
3. Sosialisasi melalui akun media sosial KPU Kabupaten Berau
4. Sosialisasi juga intens dilakukan melalui akun FB PPK atas instruksi Kadiv Sisdiklih, Parmas, dan SDM untuk 13 Kecamatan pada wilayah kerjanya masing-masing
5. PPS juga dilibatkan untuk ikut menyosialisasikan melalui akun FB PPS di masing-masing wilayah kerjanya
6. Sosialisasi dilakukan juga di FB pribadi masing-masing PPK dan PPS (Mengunggah poster dan siaran langsung kegiatan sosialisasi)

KPU Kota Samarinda :

1. *Kegiatan-kegiatan kreativitas seperti pelatihan, dialog publik, dan lain-lain oleh Relawan demokrasi KPU Kota Samarinda.*
2. *Mengadakan beberapa perlombaan seperti cerdas cermat, video unik singkat dan lain-lain yang ber-tema terkait Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.*
3. *Sosialisasi pada fasilitas publik.*
4. *Iklan pada media cetak dan elektronik.*
5. *Kegiatan tatap muka oleh KPU Kota Samarinda.*
6. *Kegiatan tatap muka ditingkat PPK se-kota Samarinda.*

KPU Kota Balikpapan :

1. *Mengoptimalkan sosialisasi keliling menjadi kegiatan rutin mingguan.*
2. *Memperbanyak pembagian bahan – bahan sosialisasi kepada masyarakat.*
3. *Optimalisasi penggunaan media massa dan media partner dalam kegiatan sosialisasi.*

KPU Kota Bontang :

1. *Sosialisasi Melalui Media Sosial (facebook, Instagram, Chanel Youtube).*
2. *Sosialisasi melalui Baliho, Spanduk, Baner, Poster.*
3. *Optimalisasi penggunaan media massa dan media partner dalam kegiatan sosialisasi/Kegiatan tahapan.*
4. *Sosialisasi melalui kerjasama MoU dengan Pihak terkait PT POS Indonesia, RS.PKT, RSIB, RS.Amalia, UNIJAYA, PKK, GOW, PT Maharani Tuperware.*
5. *Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Televisi dan Radio*
6. *Sosialisasi melalui kendaraan mobil Boncos.*
7. *Berkerjasama/mendorong Pemkot Bontang melalui Kesbangpol dan Kominfo ikut mensosialisasikan terkait Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.*

KPU Kabupaten Kutai Timur :

1. *Kegiatan-kegiatan kreativitas seperti pelatihan, dialog publik, dan lain-lain oleh Relawan demokrasi KPU Kota Samarinda.*

2. Mengadakan beberapa perlombaan seperti cerdas cermat, video unik singkat dan lain-lain yang ber-tema terkait Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.
3. Sosialisasi pada fasilitas publik.
4. Iklan pada media cetak dan elektronik
5. Kegiatan tatap muka oleh KPU Kota Samarinda
6. Kegiatan tatap muka ditingkat PPK se-kota Samarinda

KPU Kabupaten Kutai Barat :

1. Mengoptimalkan sosialisasi keliling menjadi kegiatan rutin mingguan.
2. Memperbanyak pembagian bahan – bahan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Optimalisasi penggunaan media massa dan media partner dalam kegiatan sosialisasi.

KPU Kabupaten Mahakam Ulu :

1. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi antara lain:
 - a. Sosialisasi tatap muka untuk basis Pemilih Pemula dan Pemilih Marginal.
 - b. Sosialisasi tatap muka berbasis kampung (kedua kegiatan akan di laksanakan dalam rentang waktu 4-7 Desember 2020).
 - c. Sosialisasi Media Audio Visual media cetak:
 - Spanduk dengan topik: ajakan memilih di Tanggal 9 Desember 2020.
 - Poster dengan topik: jadwal dan tata cara pemungutan suara.
 - Leaflet dengan topik: Tungsura, DPTb dan DPPH.

4. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, indeks RB Kota Balikpapan menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu:

- Tahun 2016: 62,14 (B)
- Tahun 2017: 65,97 (B)
- Tahun 2018: 66,28 (B)
- Tahun 2019: 67,31 (B)
- Tahun 2020: telah dievaluasi tetapi hasil belum diumumkan oleh Kementerian PANRB.

**Indeks RB Kota Balikpapan merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota se Kalimantan Timur.*

Sebagai upaya untuk percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, sejak tahun 2016 Wali Kota telah mencanangkan 14 perangkat daerah/unit kerja sebagai zona integritas. Dari 14 perangkat daerah/unit kerja yang diusulkan, 3 diantaranya telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB yaitu:

- Disdukcapil (2016),
- RSIA Sayang Ibu (2018), dan
- RSUD Beriman Balikpapan (2019)

Capaian jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah berhasil meraih predikat WBK di Kota Balikpapan juga merupakan yang terbanyak diantara pemkab/pemkot dan pemprov Kalimantan Timur.

Pada pertengahan Desember, dijadwalkan Kementerian PANRB akan mengumumkan hasil evaluasinya terhadap pelaksanaan zona integritas untuk DPMPPT yang proses menuju WBK dan Disdukcapil yang dalam proses menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Guna percepatan implementasi RB pada 8 area perubahan, kebijakan-kebijakan yang telah telah disusun dan diterapkan, antara lain:

- a. Area manajemen perubahan

- Menetapkan quick wins sebagai target tahunan pelaksanaan RB yang telah dituangkan dalam roadmap RB Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Membentuk dan membangun agen-agen perubahan yaitu aparatur yang berfungsi sebagai komunikator, mediator, dan katalisator pelaksanaan RB pada tiap-tiap perangkat daerah/unit kerja.
- b. Area penataan perundang-undangan
Melakukan harmonisasi terhadap produk-produk hukum existing dan produk hukum yang baru sehingga tidak terjadi tumpang tindih produk hukum yang dihasilkan.
- c. Area penataan kelembagaan
Melakukan penataan kelembagaan dengan mengutamakan efisiensi dan pederhanaan organisasi sehingga organisasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan merupakan organisasi yang miskin struktur tetapi kaya fungsi.
- d. Area penataan tatalaksana
- menerapkan dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 31 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Membangun arsitektur SPBE Pemerintah Kota Balikpapan yang salah satu tujuannya adalah integrasi data dan aplikasi.
 - Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) pada seluruh perangkat daerah untuk memberi jaminan kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi publik.
- e. Area penguatan akuntabilitas
Membangun aplikasi e-sakip yang memudahkan wali kota untuk memantau capaian kinerja perangkat daerah secara berkala.
- f. Area manajemen SD, antara lain
- Melakukan open bidding untuk rekrutmen pejabat di level Pejabat Tinggi Pratama. Saat ini 8 Pejabat Tinggi Pratama dari 34 Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan merupakan hasil dari open bidding tahun 2019. Untuk tahun 2020 telah selesai pelaksanaan open bidding untuk 3 Pejabat Tinggi Pratama.
 - Membangun ruang assessment center (CAT) yang dapat digunakan untuk proses rekrutmen pegawai.
 - Melakukan penataan dan pengelolaan sistem kepegawaian berbasis data elektronik dan website.
- g. Area penguatan pengawasan
- Pembuatan Perwali (Perwal 13 tahun 2017) tentang tata cara pelaporan LHKPN dan mewajibkan seluruh pejabat (s.d. seluruh eselon IV dan jabfung tertentu) untuk menyampaikan LHKPN dan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi yang terlambat melaporkan LHKPN.
 - Membangun dan mengembangkan whistle blowing system (WBS) yang dapat diakses baik pegawai maupun masyarakat sebagai sarana pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan aparatur.
 - Menetapkan kebijakan wali kota dalam bentuk Keputusan Wali Kota nomor 188.45-402/2016 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Membentuk Tim Saber Pungli bekerja sama POLRI dan Kejari
- h. Area peningkatan pelayanan publik
- Mendelegasikan penyelenggaraan seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan secara satu pintu ke DPMPT.
 - Membangun mal pelayanan publik (dijadwalkan diresmikan pada Februari 2021)
 - Membangun dan mengembangkan inovasi untuk memberikan pelayanan yang tepat, cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat.

- Membuka ruang yang seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti dalam penyusunan standar pelayanan dan penyampaian pengaduan masyarakat.

Hambatan-hambatan yang ditemui untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain:

- Masih adanya peraturan-peraturan di tingkat pusat yang kadang kala terjadi disharmoni, sehingga dalam pelaksanaan oleh pemerintah daerah cukup menyulitkan, seperti adanya kebijakan antara Kementerian PANRB dan Kemendagri yang mengatur objek yang sama namun dengan metode pelaporan yang berbeda. Contohnya untuk pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah, Kemendagri mewajibkan Pemda menyampaikan LPPD, sedangkan Kementerian PANRB mewajibkan Pemda menggunakan SAKIP.
- Dalam hal integritas aparatur sebagai bagian dari reformasi birokrasi, kerap kali pemerintah pusat atau instansi vertikal tidak mampu menunjukkan contoh yang baik untuk pemerintah daerah.

Pelayanan Publik dan E-Government

Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat dari indeks SPBE Kota Balikpapan sebagai hasil dari evaluasi oleh Kementerian PANRB.

Indeks SPBE Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- tahun 2018: 2,77 (B), dengan target rata-rata nasional yaitu sebesar 1,6.
- tahun 2019: 3,17 (B), dengan target rata-rata nasional yaitu sebesar 2,06.

Salah satu penerapan SPBE adalah dengan pembangunan sistem teknologi informasi dan aplikasi-aplikasi terintegrasi dan berbagi data guna mempercepat dan mempermudah layanan layanan kepada masyarakat, yaitu pemanfaatan data kependudukan untuk:

- Layanan Aplikasi E-Planning oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan
- Layanan Sistem Interkoneksi Data Kepegawaian Antarperangkat Daerah dengan Stakeholder oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan
- Pelayanan PBB – P2 oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Layanan Aplikasi E-Retribusi oleh Dinas Perdagangan
- Aplikasi Seleksi Beasiswa (Perguruan Tinggi) secara online bagi penduduk Balikpapan
- Layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Siska) oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
- Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) Dan lingkup tugas Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
- Layanan Aplikasi Sistem Informasi Pemuda Balikpapan oleh Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda
- Layanan Sistem Informasi Manajemen IMTN (Simantan) oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Bentuk-bentuk inovasi e-government yang dikembangkan Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat:

- peningkatan partisipasi masyarakat dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan) dengan alamat <http://sipp.balikpapan.go.id> yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung untuk usulan pembangunan pramusrenbang.
- Informasi pelayanan perizinan pada <http://investasi.balikpapan.go.id>
- Pendaftaran antrian online RSUD Beriman Balikpapan

- Pelayanan pengurusan beasiswa perguruan tinggi pada <http://beasiswa.balikipapan.go.id>
- Aplikasi permohonan pengurusan Surat Pengantar dan Surat Keterangan dari Kelurahan pada <http://yankel.balikipapan.go.id>
- Penggunaan QR code dan aplikasi antrian dan pembayaran online pada layanan pengujian kendaraan bermotor (kir kendaraan bermotor)
- <http://sitanggap.balikipapan.go.id> untuk layanan pengaduan masyarakat.

KTP Elektronik

- Jumlah wajib KTP Kota Balikpapan sesuai data konsolidasi bersih (DKB) semester 1 tahun 2020 sebesar 486.246 dengan jumlah capaian perekaman dan pencetakan KTP-el sebesar 485.713 atau 99,89 % .
- Sejauh ini pelayanan KTP elektronik tidak menemukan kendala sepanjang blanko KTP elektronik tersedia. Penyediaan blanko KTP-el sesuai peraturan perundang undangan menjadi kewenangan Dirjendukcapil Kementerian dalam negeri.

Rekrutmen CPNS dan PPPK

- Dari segi proses pelaksanaan rekrutmen CPNS telah dilaksanakan secara objektif dan transparan dengan system CAT BKN sehingga tidak ada KKN selama rekrutmen berlangsung. Yang perlu mendapat perhatian khusus pelaksanaan rekrutmen CPNS Tahun 2019 yaitu adanya perubahan aturan ditengah-tengah pelaksanaan rekrutmen CPNS Tahun 2019 (setelah daerah telah mengumumkan penerimaan seleksi) antara lain seperti aturan terkait akreditasi Perguruan Tinggi/ Prodi, pengecualian STR bagi tenaga kesehatan yang mendaftar jabatan penyuluh kesehatan masyarakat, sehingga teknis pelaksanaan di Daerah juga perlu dilakukan penyesuaian terkait perubahan aturan tersebut. Ditambah pula dengan adanya pandemi COVID 19 sehingga pelaksanaan rekrutmen mengalami penundaan dan mengikuti standar protokol pencegahan dan pengendalian COVID 19. Perlu diinformasikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan belum melaksanakan rekrutmen PPPK Tahap 1 mengingat aturan terkait PPPK Tahap 1 tersebut belum jelas.
- Balikpapan telah mengusulkan 239 formasi untuk mendapatkan pertimbangan teknik (pertek) NIP CPNS. Sampai dengan saat ini usulan penetapan NIP CPNS T.A 2019 tersebut masih proses di Kanreg VIII BKN Banjarmasin untuk mendapatkan pertimbangan teknik (pertek) NIP CPNS.

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- a. Tidak ada kendala yang berarti karena kegiatan refocusing dilaksanakan pada awal tahun anggaran yaitu bulan Maret 2020 dimana masih belum banyak kegiatan di OPD yang dilaksanakan kontrak sehingga kegiatan refocusing bisa berjalan dengan baik;
- b. Pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi berjalan dengan baik dengan berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta mengenai pengadaan dalam keadaan darurat diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VIII Pengadaan Khusus. kendalanya di awal pandemi sangat sulit mendapatkan alat kesehatan dan APD untuk tenaga kesehatan akibat kelangkaan sehingga berpengaruh pada harga perolehan yang tinggi;
- c. Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Balikpapan sebesar **Rp. 136.991.767.700** terdiri dari :
 1. Penanganan kesehatan sebesar Rp. 61.867.767.700,-

2. Penanganan ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 75.124.000.000,-
- d. Tidak terdapat pengaruh kegiatan refocusing anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 dengan program-program yang telah disusun sebelumnya dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

- a. Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan hibah kepada penyelenggara Pilkada Tahun 2020 sebesar **Rp. 70.529.115.500,-**dengan rincian sebagai berikut :

1. Hibah Kepada KPU Kota Balikpapan **Rp. 53.985.396.500,-**
2. Hibah kepada Bawaslu Kota Balikpapan **Rp. 11.543.719.000,-**

Pemerintah Kota Balikpapan juga membantu dalam pelaksanaan test rapid kepada seluruh petugas yang terlibat di KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS Pengawas TPS dan KPPS sebelum melaksanakan tugas terutama saat pemungutan suara

- b. Hasil evaluasi :

- Tingkat partisipasi pemilih sebesar 59,94 %
- Penyelenggara, petugas, peserta dan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 telah mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19
- Pada penyelenggaraan Pilkada 2020 situasi dan kondisi dalam keadaan lancar, kondusif, dana man
- Selama pelaksanaan Pilkada 2020 tidak ditemukan ASN yang tidak netral.

5. KANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kondisi Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur

Dari total estimasi 1,75 juta bidang tanah di Provinsi Kalimantan Timur dan 0,4 juta bidang tanah di Provinsi Kalimantan Timur, sampai saat ini telah terdaftar sebanyak 1.05 juta bidang di Provinsi Kalimantan Timur dan 0,23 juta bidang di Provinsi Kalimantan Utara atau secara keseluruhan telah terdaftar sekitar \pm 60% dari total seluruh bidang tanah.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur membawahi 13 Kantor Pertanahan yang terdiri dari 9 Kantor Pertanahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan wilayah kerja sebanyak 10 Kota/Kabupaten dan 4 Kantor Pertanahan di Wilayah Kalimantan Utara dengan wilayah kerja sebanyak 5 Kabupaten/Kota.

Pendapatan Negara dari Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2020:

Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Pertanahan = 32,26 Miliar

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan = 182,40 Miliar

Pajak Penghasilan Peralihan Hak atas Tanah = 113,55 Miliar

Data Luas Bidang Tanah Terdaftar

Provinsi	Luas Kawasan Hutan		Luas APL	
	Ha	%	Ha	%
Prov. Kaltim	8.366.385.822	65,39	4.428.311.501	34,61

Prov. Kaltara	5.551.991.799	80,31	1.360.806.518	19,69
Total	13.918.377.621	70,62	5.789.118.019	29,38

Luas Area Penggunaan Lain : 5.789.118.019 Ha
Luas Kawasan Pertambangan : 1.789.996.593 Ha
Luas Bidang Tanah Terdaftar : 2.461.709.331 Ha

Bidang Tanah Terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur 1.947.606,725 Ha (69,99%)
Bidang Tanah Terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara 514.102.606 Ha (42,15%)

Data Jumlah Bidang Tanah Terdaftar

Perkiraan Jumlah Bidang Tanah: 2.159.808 Bidang

Bidang Tanah terdaftar: 1.286.250 Bidang (59,55%)
Bidang Tanah belum terdaftar: 873.558 Bidang (40,45%)

Jumlah Bidang Tanah terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur: 1.069.928 Bidang
Jumlah Bidang Tanah terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara: 216.322 Bidang

Capaian PTSL Tahun 2017 – 2020 mencapai 442.044 bidang

2017 : 82.000 bidang
2018 : 126.886 bidang
2019 : 97.804 bidang
2020 : 35.354 bidang + 100.000 bidang dalam proses (World Bank)

Progres Pendaftaran Tanah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

2016 : 44,63%
2017 : 47,45%
2018 : 53,22%
2019 : 56,43%
2020 : 59,55%

Dampak Pandemi Covid-19

1. Terhambatnya pelaksanaan sebagian kegiatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat
2. Adanya saving anggaran berpengaruh terhadap target Kegiatan Strategis
3. Refocussing kegiatan yang dapat dilakukan selama kegiatan WFH, kegiatan peningkatan kualitas dan validasi data serta penyiapan data elektronik. Progres Data Siap Elektronik meningkat saat awal pandemi adanya pembatasan kegiatan.

Sengketa dan Konflik Pertanahan di Wilayah kerja Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur

Kendala Penyelesaian:

1. Data yuridis (warkah) dan data fisik (Peta) tidak ditemukan secara lengkap
2. Informasi pengaduan terkait subjek dan objeknya tidak lengkap dan jelas
3. Pihak kurang kooperatif

Strategi Pencegahan:

1. Pembuatan Peta Tematik sebaran Sengketa, Konflik dan Perkara
2. Percepatan digitalisasi (paperless)

3. Memaksimalkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi terkait pertanahan khususnya pengaduan dan penanganan masalah

Ketersediaan Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi (CSRT) yang mencakup seluruh wilayah Kalimantan Timur dimana berdasarkan Inpres No.6 Tahun 2012 penyediaan CSRT hanya dapat dilakukan oleh BIG.

Kondisi Titik Dasar Teknik yang persebarannya belum rapat dengan kondisi tidak terawat banyak yang rusak. Jumlah dan kondisi Base Station JRSP maupun inacors BIG yang belum tersebar merata serta sebagian besar offline.

SDM Pengukuran dan Pemetaan

ASN Petugas Ukur

Kanwil : 7 aktif, 1 tugas belajar
Satker Kaltim : 33 aktif, 6 tugas belajar
Satker Kaltara : 19 aktif, 2 tugas belajar

Surveyor Kadaster Berlisensi:

SKB : 8 orang, 3 orang dilantik Tahun 2020

Asisten Surveyor Kadasstral Berlisensi

ASKB 59 orang seluruhnya dilantik Tahun 2020

48 diantaranya merupakan lulusan Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN di Provinsi Kalimantan Timur

Peta Kawasan Calon Ibukota Negara (IKN)

Kawasan IKN 56.181 Ha

Wilayah KIKN tebagi habis menjadi 6 klaster pengembangan (melipuri 6 BWP) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan deliniasi Pokja 8 tanggal 18 Mei 2020

Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN) 256.142,72 Ha meliputi:

Kabupaten Penajam Paser Utara = Kecamatan Sepaku (92.718,15 Ha)

Kabupaten Kutai Kertanegara =

1. Sebagian Kecamatan Loakulu (24.883,35 Ha)
2. Sebagian Kecamatan Loa Janan (33.093,54 Ha)
3. Kecamatan Muara Jawa (32.131.11 Ha) dan
4. Kecamatan Samboja (71.745,40 Ha)

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 6.596,69 Ha

Deliniasi KIPP/BWP Pusat Pemerintahan merujuk pada kesepakatan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian PUPR

Isu strategis terkait masalah pertanahan dan tata ruang di lokasi IKN

1. Peningkatan penguasaan masyarakat di kawasan hutan
2. Klaim kepemilikan tanah di Kawasan Calon IKN
 - Pengakuan Ketua Pengelola Tanah Perwatanan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pagerang Ario Jaya Winata bahwa tanah di IKN adalah milik Kesultanan Kutai yang meliputi Kutai Kertanegara, Samarinda, Balikpapan, PPU, Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Bontang
 - Surat Permohonan Kajian Tanah Grand Sultan Kartanegara 1902 untuk Calon Lokasi Ibu Kota Baru dari Ir. Fartchurrohman Nugro yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Ahli Waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Mohamad Parkesit dengan luas berdasarkan pengakuan yang bersangkutan seluas ± 105.000 Ha

- Klaim pemilikan tanah dari Kelompok Tani Borneo Makmur Jaya sesuai Surat Permohonan Pengecekan Lahan Kelompok Tani Borneo Makmur Jaya tanggal 3 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur

3. Tumpang tindih (overlap) Perizinan

- Terdapat indikasi adanya tumpang tindih (overlap) diantara perizinan pertambangan, perkebunan, kehutanan, Migas dan Kawasan Hutan
- Di dalam perizinan atau Kawasan Hutan tersebut juga terdapat penguasaan masyarakat

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Reses ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2020

Ketua Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI

Bpk. Arif Wibowo

A-210

